

ABSTRAK

Judul: Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Rumusan Masalah: 1). Mengapa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat?, 2). Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima?. Tujuan: 1). Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat, 2). Untuk Mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. Sifat Penelitian adalah deskriptif yaitu penulis menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan yang mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam sengketa Penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Variabel adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah: alasan hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima pada sengketa Penerbitan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah: putusan Hakim dalam penyelesaian sengketa Penerbitan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis lakukan maka: 1). Alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat adalah: Karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berupa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengandung cacat yuridis dan terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 2). Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima adalah: Karena gugatan yang diajukan penggugat mengandung cacat formil berupa Gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh hari). Saran dari penulis yaitu: 1). Kepada setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara agar selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, Aspek Substansi dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik; 2). Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih mencermati tentang tenggang waktu agar tidak salah dan keliru dalam nenerapkan hukum.

Kata Kunci: Menteri Agraria dan Tata Ruang, Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

ABSTRACT

Title: Description of the Settlement of Disputes Regarding the Issuance of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning's Decree on the Approval of the Conformity of Spatial Utilization Activities. **Problem Formulation:** 1). Why did the judges of the Administrative Court and the Supreme Court grant the plaintiff's lawsuit?, 2). Why did the judges of the High Administrative Court declare the plaintiff's lawsuit inadmissible?. **Objectives:** 1). To understand the reasons why the judges of the Administrative Court and the Supreme Court granted the plaintiff's lawsuit. 2). To understand the reasons why the judges of the High Administrative Court declared the plaintiff's lawsuit inadmissible. The nature of this research is descriptive, meaning the author explains, illustrates, and elaborates on the reasons why the panel of judges at the Administrative Court and the Supreme Court issued decisions in favor of the plaintiff, while the panel of judges at the High Administrative Court declared the plaintiff's lawsuit inadmissible in the dispute over the issuance of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning's Decree on the Approval of the Conformity of Spatial Utilization Activities. This type of research uses normative legal research. The variable refers to the core issues being examined. **Independent Variable:** The reasons why the judges at the Administrative Court and the Supreme Court issued rulings in favor of the plaintiff, while the High Administrative Court declared the plaintiff's lawsuit inadmissible in the dispute over the issuance of the Minister's Decree on the Approval of the Conformity of Spatial Utilization Activities. **Dependent Variable:** The judge's ruling in settling the dispute over the issuance of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning's Decree on the Approval of the Conformity of Spatial Utilization Activities. The types and sources of data used in this research are secondary data.

Based on the results of the research conducted by the author: 1). The reason the judges of the Administrative Court and the Supreme Court granted the plaintiff's lawsuit is because the plaintiff was able to prove the arguments in the claim, namely that the lawsuit was filed within the 90 (ninety) day time limit, and that the State Administrative Decree issued by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency contained legal defects and was proven to contradict prevailing laws and regulations as well as the General Principles of Good Governance. 2). The reason the judges of the High Administrative Court declared the plaintiff's lawsuit inadmissible is because the lawsuit submitted by the plaintiff contained a formal defect, namely that the claim was submitted after the 90 (ninety) day time limit had passed. **Suggestions from the author:** 1). Every State Administrative Agency or Official, in issuing a State Administrative Decree, should always consider the applicable laws and regulations in terms of authority, procedure, substance, and the General Principles of Good Governance. 2). Judges, in issuing rulings, must pay closer attention to the time limits so as to avoid errors in the application of the law.

Keywords: Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning, Approval of Spatial Utilization Activities